

MENJELANG PIALA PRESIDEN: Pesepakbola PSS Sleman mengikuti latihan dan uji coba lapangan jelang pertandingan melawan Persis Solo pada Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/6). Pertandingan Piala Presiden 2022 akan diawali laga pembuka Persis Solo melawan PSS Sleman di Stadion Manahan Solo pada Sabtu (11/6) yang rencananya boleh disaksikan penonton maksimal 75 persen dari kuota stadion.

#### ATASI PENYAKIT MULUT DAN KUKU

## Pemerintah Siapkan Satgas PMK

JAKARTA (KR) - Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK), untuk mengatasi penyakit yang menyerang hewan ternak di Indonesia lantaran sudah menyebar sa-

"Kami akan lakukan penanganan PMK di tingkat mikro seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PP-KM), jadi nanti akan ada Satgas PMK sampai ke kecamatan dan desa," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam media briefing Global Crisis Response Group (GCRG) di Jakarta, Jumat (10/6).

Susiwijono menjelaskan, saat ini virus tersebut sudah serius dampaknya di 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota di Tanah Air. Sebagai informasi, PMK pada hewan ternak disebabkan oleh virus yang sangat mudah menular antarternak dan terutama menyerang ternak atau hewan berkuku belah. Proses penularan dapat melalui kontak langsung dan angin, tetapi penyakit ini tidak menular ke manusia (bukan

Pada 5 Mei 2022, telah dilaporkan kasus positif PMK pertama kali di Provinsi Jawa Timur pada empat kabupaten yaitu Gresik, Sidoarjo, Lamongan, serta Mojokerto dan pada 7 Mei 2022 di Provinsi Aceh tepatnya Kabupaten Aceh Tamiang.

Tak hanya kepada hewan ternak, Susiwijono berpendapat, PMK kemungkinan akan berdampak terhadap perekonomian, terutama ekspor karena beberapa sapi asal Indonesia dianggap berpotensi menjadi media pembawa virus dan pada akhirnya berdampak ke sektor lainnya. "Kami akan serius menangani ini, demikian pula berbagai isu lain akan kami tangani secara prioritas," ungkapnya.

Selain Satgas, pihaknya sudah mempersiapkan dukungan penganggaran penanganan PMK dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan demikian, isu di dalam negeri akan diusahakan terus ditangani dengan baik terutama terkait pangan yang langsung berdampak ke (Ant/San)-d masyarakat.

#### PENGUNJUNG HARUS PAKAI SANDAL

# 3 Kriteria Naik Candi Borobudur Gratis

YOGYA (KR) - Pemerintah, selain akan menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur, juga menetapkan kuota pengunjung yang diperbolehkan masuk tidak lebih dari 1.200 orang per hari. Selain itu yang naik candi harus memakai sandal untuk mengurangi kerusakan jalan naik candi.

"Usulan kenaikan tiket naik dan pembatasan pengunjung, lama dibicarakan dua tahun terakhir. Bertujuan konservasi, tiket naik Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu bagi wisatawan lokal, wisatawan mancanegara 100 Dolar dan pelajar Rp 5 ribu," kata Direktur Taman Wisata Candi Borobudur Edy Setijono dalam Seminar Series Kepariwisataan secara daring bertema 'Membicarakan (lagi) Borobudur antara Konservasi dan Pariwisata', Jumat (10/6).

Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pariwisata (Puspar) UGM itu menghadirkan narasumber lain yakni Wiwit Kasiyati SS MA (Kepala Balai Konservasi Borobudur), Boby Ardyanto Setya Aji (Ketua Gabungan Industri Pariwisata DIY), Prof Ir T Yoyok Wahyu Subroto MEng PhD IPU (Guru Besar Arsitektur Fakultas Teknik, Tenaga Ahli Puspar UGM), Dr rer nat Wiwit Suryanto SSi MSi (Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, FMIPA UGM).

Edy Setijono menyatakan ada empat kriteria pengunjung yang nantinya diperkenankan naik ke puncak candi terbesar di dunia. Tiga pertama masuk tanpa dipungut biaya. Pertama tamu kenegaraan, Candi Borobudur masih menjadi kebanggaan bangsa dan harus senantiasa diperkenalkan sehingga menjadi salah satu bagian agenda kunjungan kenegaraan.

Kedua, kegiatan keagamaan diberi ruang dengan tetap mengizinkan atau memberi ruang pemimpin upacara keagamaan untuk naik ke puncak. "Jadi bukan peserta, melainkan pemimpin. Silakan untuk upacara agama mengajukan perizinan," tegasnya.

Ketiga semua warga Negara Indonesia yang telah mendapatkan izin dari otoritas yang nanti ditentukan dan sesuai kriteria yang ditetapkan. Para akademisi atau peneliti masih diperkenankan untuk mengakses asalkan dengan persyaratan.

"Ketiga kriteria ini kita terapkan untuk mencegah orang-orang yang tidak relevan dengan pelestarian dan konservasi candi hadir. Yang masuk tiga kategori ini harus di treatment khusus," lanjutnya.

Kriteria terakhir adalah kelompok masyarakat umum yang harus dikenakan tarif, angkanya harus tinggi. Angka yang ditentukan adalah angka keberpihakan pada pelestarian dan kepentingan mendalam pada Candi Borobudur.

Kepala Balai Konservasi Borobudur Wiwit Kasiyati menyebut kehadiran pengunjung selama bertahun-tahun, dan yang pernah mencapai puncaknya hingga 55 ribu orang per hari menyebabkan kerusakan pada lantai. (Dev)-f

## Bawaslu Buka Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024

JAKARTA (KR) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membuka pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 sekaligus meluncurkan Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024, Jumat (10/6). "Semakin cepat semakin baik (pendaftaran pemantau pemilu), sehingga pemantau bisa mengawal dan mengawasi tahapan Pemilu 2024," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta.

Beberapa syarat pemantau, yakni organisasi berbadan hukum, bersifat netral, nonpartisan dan independen. Setelah syarat terpenuhi, Bawaslu akan memberikan akreditasi bagi para pemantau pemilu yang akan berpartisipasi mengawasi Pemilu 2024. Bawaslu menargetkan bisa menerima pendaftaran sebanyak-banyaknya pemantau pemilu untuk ikut berpartisipasi mengawasi Pemilu 2024. "Pada Pemilu 2019 ada sekitar 136 pemantau pemilu," kata Bagja.

Untuk tingkat nasional, pemantau pemilu bisa mendaftar lewat Meja Layanan Pemantau Pemilu 2024 Bawaslu RI. Kemudian, pemantau pemilu yang berada di daerah bisa mendaftar lewat Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota. Pada pengawasan tahapan Pemilu 2024, katanya, Bawaslu berkomitmen meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Komitmen tersebut dibuktikan, Bawaslu dengan memfasilitasi individu yang terpanggil memantau pemilu.

### PRESIDEN TARGETKAN

## 360 Juta Bibit dari 30 Pusat Persemaian

Widodo menargetkan, dari 30 pusat perkecambahan, rumah produksi, persemaian di Indonesia, dalam tiga hingga kolam air dan sedimen. tahun ke depan sudah mampu mem produksi 360 juta bibit tanaman.

"Target kita dalam tiga tahun ke depan ada kurang lebih 30 pusat persemaian atau 'nursery' seperti yang kita lihat di Rumpin ini, dengan produksi setahun 10 juta-12 juta, artinya kalau kita memiliki 30 pusat persemaian dalam setahun menghasilkan kira-kira 360 juta bibit atau benih," ujar Presiden Jokowi saat menghadiri peluncuran Program Rehabilitasi Mangrove dan World Mangrove Center di Persemaian Rumpin, Bogor, Jumat (10/6).

Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin berdiri di atas lahan seluas 159,58 hektare yang terdiri atas zona perbenihan, zona kelola masyarakat, zona diklat, dan zona koridor pengembangan usaha dengan kapasitas produksi sekitar 16 juta bibit. Di lokasi tersebut tersedia

BOGOR (KR) - Presiden Joko sejumlah fasilitas seperti area rumah

Kita ingin meneguhkan komitmen kita terhadap perubahan iklim, terhadap perbaikan lingkungan yang rusak, tapi dengan aksi-aksi yang jelas, aksi-aksi yang konkret dan bisa dilihat." kata Presiden.

Presiden pun sejak tiga tahun lalu telah memerintahkan untuk membangun nursery atau pusat persemaian sebanyak-banyaknya. Mulai 2021, Pemerintah membangun sekitar tuiuh lokasi pembibitan yaitu di Bogor, Jawa Barat; Toba, Sumatera Utara; Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; dan Likupang, Sulawesi Utara.

"Kalau benihnya ada, kalau bibitnya ada, mau tidak mau barang ini harus kita tanam. Jadi bukan beberapa hektare yang akan kita kerjakan tapi berapa produksi bibit yang bisa kita produksi, baru di mana kita tanam bibit-bibit ini," kata Presiden.

Penanaman bibit-bibit tersebut menurut Presiden, dapat dilakukan di lahan kritis di daerah yang sering longsor. "Atau di Daerah Aliran Sungai, terutama di hulunya dan ini sudah kita mulai, konkret dan sudah kita mulai seperti di Ciliwung sudah," tambah Presiden.

Bibit-bibit tersebut. menurut Presiden, sudah dikirim ke beberapa kabupaten dan kota yang banyak memiliki lahan kritis. "Inilah proses rehabilitasi lingkungan, kita memperbaiki lingkungan kita dengan aksi-aksi yang jelas dan konkret dan bisa dihitung. Sekali lagi, akan ada 30 nursery seperti ini tahun ini, kita perkirakan akan jadi lagi delapan pada tahun depan, tambah lagi, artinya langkah-langkah menuju ke perbaikan lingkungan itu konkret dan bisa dilihat," jelasnya.

Mengenai rehabilitasi lahan mangrove, Presiden sudah memerintahkan agar hingga akhir 2024 paling tidak 600.000 hektare. (Ati/Sim)-f

### JADI FOKUS PERHATIAN SATPOL PP DIY Cegah Kejahatan Jalanan, Libatkan Jaga Warga

#### YOGYA (KR) - Seiring melandainya anggota. Jumlah tersebut diprediksi makasus harian Covid-19 dan keputusan KM Level 1 di DIY, ketugasan Satuan 4.000 kelompok Jaga Warga. Dengan de-Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY tidak lagi difokuskan pada operasi penegakan protokol kesehatan (prokes), melainkan lebih pada pencegahan aksi kejahatan jalanan. Untuk itu, sumber daya manusia yang ada di Satpol PP DIY dioptimalkan guna mengawasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) hingga pencegahan aksi kejahatan jalanan.

"Mengingat saat ini DIY sudah diterapkan PPKM Level 1. jadi untuk penegakan prokes sudah kesadaran sendiri, tidak perlu ada peringatan lagi. Karena itu, fokus kami lebih ke penegakan Perda serta pencegahan aksi kejahatan jalanan. Langkah pencegahan dilakukan dengan melibatkan kelompok Jaga Warga yang tersebar di kabupaten/kota di DIY," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, Jumat (10/6).

Noviar mengatakan, saat ini di DIY sudah ada 1.831 kelompok Jaga Warga, dimana untuk setiap kelompok terdiri 25

sih akan terus bertambah, karena pihak-Pemerintah Pusat memberlakukan PP- nya menargetkan membentuk lebih dari mikian, di setiap padukuhan bisa ditemukan kelompok Jaga Warga, sehingga koordinasi bisa lebih mudah dilakukan.

"Keberadaan kelompok Jaga Warga ini memiliki peran penting. Sebab kelompok Jaga Warga ada di tengah masyarakat sehingga mengetahui dan memahami kondisi lingkungannya. Mereka bisa melakukan pendekatan terhadap keluarga yang anaknya berpotensi melakukan aksi kejahatan jalanan," terangnya.

Menurut Noviar, pihaknya selalu membekali dan memberikan edukasi terhadap kelompok Jaga Warga. Edukasi ini lebih menekankan pada pencegahan dibanding penindakan. Jadi upaya yang dilakukan lebih pada metode persuasif dengan mendekati keluarga maupun anak agar mereka dapat mengisi kegiatan sehari-hari secara positif.

"Upaya yang kami lakukan lebih banyak bersifat preventif atau pencegahan,'

### KEJAGUNG-BAWASLU SEPAKATI MOU

## Peraturan KPU Resmi Diundangkan

JAKARTA (KR) - Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 resmi diundangkan menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Peraturan tersebut juga sudah diunggah di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Jumat (10/6) menjelaskan, secara spesifik jadwal tahapan yang telah diresmikan dalam PKPU No 3/2022 itu menjelaskan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih digelar sejak 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023. Kemudian, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pada 29 Juni-13 Desember 2022, penetapan peserta pemilu 14 Desember 2022, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pada 14 Oktober 2022-9 Februari 2023.

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada 19 Oktober-25 November 2023, masa kampanye pemilu 28 November 2023-10 Februari 2024. Sedangkan, jadwal masa tenang 11-13 Februari 2024, pemungutan suara 14 Februari 2024, penghitungan suara 14-15 Februari 2024, rekapitulasi hasil penghitungan suara 15 Februari-20 Maret 2024. Penetapan Presiden dan Wakil

Presiden terpilih paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu. Atau, penetapan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu. Jika terjadi Pemilihan Presiden tahap kedua, tahapan kampanye akan digelar pada 2-23 Juni 2024 dan pemungutan suara pada 26 Juni 2024.

Sementara itu, kerja sama dilakukan antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam membangun koordinasi terkait penguatan kelembagaan dan penegakan hukum untuk pelaksanaan Pemilu

"Karena itu kejaksaan mendukung penuh tugas-tugas yang dilakukan Bawaslu dalam rangka penguatan kelembagaan dan penegakan hukum. Untuk itu, ke depannya akan dilakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding)," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam keterangannya, kemarin.

Dijelaskan, untuk implementasi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota akan dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama atau PKS. Sehubungan hal itu, Jaksa Agung Burhanuddin menerima kunjungan dari anggota Bawaslu dalam rangka melakukan koordinasi dan pembahasan MoU tersebut.

Burhanuddin berpandangan, penyelenggaraan Pemilu sudah menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, yang tercantum di dalam MoU nanti tidak hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga mengenai pendidikan, pendampingan dan pendirian posko bersama dalam rangka penyelenggaraan menyukseskan Pemilu 2024. (Ful)-f

### PASCA PENGGELEDAHAN KANTOR

## Dua Tokoh Khilafatul Muslimin Tersangka

KLATEN (KR) - Pasca penggeledahan sejumlah kantor sekretariat, kini Polres Klaten tetapkan dua orang tokoh Khilafatul Muslimin Jawa Tengah menjadi tersangka. Yakni IM, yang berstatus pemimpin atau amir wilayah Jawa Tengah, dan SW, amir quro atau ketua cabang wilayah Klaten.

Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo Jumat (10/6) mengemukakan, usai melakukan penggeledahan di enam lokasi dan memeriksa beberapa saksi, penyidik akhirnya menahan dan menetapkan dua tokoh Khilafatul Muslimin Jateng menjadi tersangka.

Menurut Kapolres, keduanya terancam pasal 14 ayat 1 dan atau pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum pidana dan atau Pasal 107 Jo 53 KUHP dengan ancaman hukuman selama-la-



Kapolres menunjukkan barang bukti dan tersang-

manya dua puluh tahun penjara atau seumur hidup.

Pasal yang dijeratkan kepada keduanya yakni soal menyiarkan kabar atau pemberitahuan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Juga soal menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, kabar yang akan

atau mudah menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dan atau percobaan makar dengan niat menggulingkan pemerintah.

Dijelaskan Kapolres Klaten, kelompok Khilafatul Muslimin Klaten melakukan aksinya pada Minggu (29/5) dengan konvoi sepeda motor yang berjumlah sekitar lebih 50 orang.

(Sit)-f